BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pelaksanaan penelitian dan pembahasan yang telah penulis uraikan pada bab sebelumnya mengenai Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas pada Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Barat, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Prosedur sistem akuntansi pengeluaran kas pada Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Provinsi Jawa Barat sesuai dengan **Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006** tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Sistem dan Prosedur Akuntansi Pengeluaran kas berupa Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung yang sah telah dilakukan sesuai dengan sistem dan prosedur akuntansi dalam peraturan perundangan dimana ada pemisahan tugas yang jelas dan adanya pertanggungjawaban untuk setiap pengeluaran kas sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Dalam pelaksanaan pengeluaran kas telah didukung dengan dokumen-dukumen terkait yaitu Salinan Surat Penyediaan Dana (SPD), Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), dan Surat Pertanggungjawaban(SPJ) disertai dengan dokumen transaksi yang melengkapi sistem akuntansi pengeluaran kas.

5.2 Saran

Sebagai implikasi dari kesimpulan yang disampaikan, penulis ingin memberikan saran dengan harapan dapat bermanfaat bagi perbaikan instansi khususnya dalam sistem akuntansi pengeluaran kas pada BPLHD provinsi Jawa Barat, yaitu :

1. Sistem dan prosedur akuntansi pengeluaran kas telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah dalam Negeri, Sebaiknya BPLHD Provinsi Jawa Barat mempertahankan kepatuhan terhadap peraturan tersebut dan sebisa mungkin menghindari kelalaian atau niat yang tidak baik dari oknum yang tidak bertanggung jawab untuk mengambil keuntungan dari kesempatan yang ada dengan lebih meningkatkan pengawasan khususnya dalam pengeluaran kas baik yang dilakukan dari atasan masing-masing atau dari bagian-bagian lain yang saling berkaitan. Sehingga penyimapangan atau penyahgunaan wewenang dapat dihindari.
2. Dalam mengatasi kendala yang bias saja terjadi dalam pelaksanaan sistem akuntansi pengeluaran kas yaitu dengan dalam mengontrol para pelaksana teknis kegiatan, sehingga tidak terjadi kelalaia.